



## JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>  
E-ISSN 2830-3679

### Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una

Moh Samsul<sup>a</sup>, Sahmin Noholo<sup>b</sup>, Siti Pratiwi Husain<sup>c</sup>

<sup>a b c</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: samsultangahu@gmail.com<sup>a</sup>, sahmin.noholo@ung.ac.id<sup>b</sup>, pratiwi.husain@ung.ac.id<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

##### **Riwayat Artikel:**

Received: 4 April 2025

Revised: 16 April 2025

Accepted: 19 April 2025

##### **Kata Kunci:**

Akuntabilitas, Transparansi,  
Dana Desa

##### **Keywords:**

Accountability, Transparency,  
Village Funds

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi yaitu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Ketidak sesuaian pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang masih lemah, perangkat desa belum kompeten di bidangnya serta keterbukaan kepada publik nampak tidak transparansi dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Togean Kab. Tojo Una-Una. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, dengan sampel pada penelitian ini aparat desa pada kecamatan Togean yang berjumlah 68 responden. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Akuntabilitas (X1) menghasilkan nilai signifikan sebesar  $0.026 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Togean Kab, Tojo Una-Una. Pada variable Transparansi (X2) menghasilkan nilai signifikan sebesar  $0.020 > 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tranparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una. Selanjutnya variable Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis uji simultan f dimana diperoleh dari nilai signifikasi yaitu  $0,006 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) ada pengaruh secara simultan terhadap variabel Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Y).

#### ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon that occurs, namely the village government in running its government and in managing its finances is not in accordance with Law No. 6 of 2014 and Permendagri No. 20 of 2018. The inconsistency of the implementation of Village Fund Allocation Management is still weak, village officials are not competent in their fields and openness to the public does not seem transparent and accountable. This study aims to analyze the effect of accountability and transparency on the management of village fund allocations in Togean District, Tojo Una-Una Regency. This study uses a quantitative approach, with the sample in this study being village officials in Togean District totaling 68 respondents. The results of this study found that Accountability (X1) produces a significant value of  $0.026 < 0.05$ , so it can be concluded that Accountability (X1) has a significant effect

*on Village Fund Management Allocation (Y) in Togean District, Tojo Una-Una Regency. In the Transparency variable (X2) produces a significant value of  $0.020 > 0.05$ , it can be concluded that Transparency (X2) has a significant effect on the Management of Village Fund Allocation (Y) in Togean District, Tojo Una-Una Regency. Furthermore, the Accountability and Transparency variables have an effect on the management of village fund allocation in Togean District, Tojo Una-Una Regency. This is proven by the results of the simultaneous hypothesis test where the significance value is  $0.006 < 0.05$ , it can be concluded that all independent variables Accountability (X1) and Transparency (X2) have a simultaneous effect on the Village Fund Management Allocation variable (Y).*

**@2025 Moh Samsul, Sahmin Noholo, Siti Pratiwi Husain  
Under License CC BY-SA 4.0**

## PENDAHULUAN

Paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik (terpusat) kini mengalami perubahan menjadi desentralistik (otonomi daerah). Dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah pun sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan ini, yaitu dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan berwibawa (*good governance*). Selain itu dengan adanya perubahan tersebut akan membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Agar pembangunan daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka mengharuskan adanya pengalokasian dana yang baik juga (Ultafiah, 2017).

Pengelolaan keuangan Desa merupakan serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang dimulai dengan satu tahap kemudian ke tahap berikutnya. Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik jika siklus Pengelolaan keuangan Desa pun berjalan dengan baik. Selain itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan penyelenggaraan keuangan Desa diselesaikan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Keberadaan akuntabilitas begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan kepada lembaga tersebut. Peran masyarakat penting dalam melakukan kontrol terhadap lembaga atau institusi yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan pembangunan dan Pengelolaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan undang-undang (Nahrudin, 2014 : 194 ).

Sementara transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan- keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu (Nahrudin, 2014 : 195).

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam Pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip Pengelolaan alokasi Alokasi Dana Desa (Garung, 2020). Alokasi Alokasi Dana Desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti beberapa desa Kec. Togean Kabupaten Tojo Una-Una, fenomena yang terjadi saat ini adalah pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal-hal yang tidak sesuai antara lain pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang masih lemah, perangkat Desa belum kompeten di bidangnya serta keterbukaan kepada publik tentang alokasi Alokasi Dana Desa nampak tidak transparansi dan akuntabel.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik adalah Pengelolaan yang dapat berjalan secara efektif dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban. Banyak fakta menunjukkan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk mendorong kemandirian desa tidak berjalan dengan semestinya, dimana pemberian dana tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang melakukan penyelewengan dana melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satu contoh kasus yang terjadi disalah satu desa kec. Togean yaitu desa Titirii Popolion tersandung kasus korupsi Alokasi Dana Desa yang didasari guna pemenuhan kebutuhan pribadi. Dana sekitar 400 juta yang diselewengkan oleh Kepala Desa Titirii Popolion Kab. Tojo Una-una dan sudah diamankan oleh pihak kejaksanaan kabupaten Tojo Una-una pada tahun 2021. Hal terus bergulir hingga pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang saat ini dipandang kurang baik dalam proses Pengelolaannya. Maka peneliti bermaksud untuk menganalisis terkait transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Melihat persoalan-persoalan tersebut, untuk mewujudkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Prinsip tersebut digunakan dengan tujuan agar perangkat Desa dapat bertindak sesuai dengan pedoman moral dan hukum dengan memberikan komitmen untuk Pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi perintah (Prinsipal) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9).

Hasil analisis studi penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan adanya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Seperti yang dilakukan oleh Ultrafiah (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Merapi Baray Kabupaten Lahat. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa-desa di Kecamatan Papar. Disisi lain, terdapat juga penelitian yang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiqur Rohman, dkk (2023) tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial variabel akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## KAJIAN PUSTAKA

### Grand Theory Agency Theory

*Agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Namun, dalam hal ini peneliti akan focus membahas pada instansi pemerintahan.

*Agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: a) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest), b) manusia memiliki rasional terbatas mengenai persepsi masa datang (boundedrationality), dan c) manusia selalu tak suka risiko (risk-averse). Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) mengikat orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas kehendak mereka, dengan mendelegasikan kekuasaan beberapa pengambilan keputusan kepada agen (Anggreani,2011).

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Ismail dan Widagdo, 2016).

Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yaitu seorang principals/seorang pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah/agent untuk mengelola alokasi dana desa. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas transparansi.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27).

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja agar pengendalian dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah, 2016).

Sudut pandang lain mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2016:18).

Untuk menciptakan proses akuntabilitas publik yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban publik yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik. Teori lain mengatakan bahwa akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi organisasi pemerintahan desa dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas

diperlukan agar setiap pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap kepala desa dan aparat pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik tentang desa yang berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang kepala desa (Hoesada, 2019:273)

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Transparansi**

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya transparansi akan menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Indikator transparansi adalah ketersediaan sistem informasi, aksesibilitas terhadap alokasi Alokasi Dana Desa, publikasi laporan keuangan dan ketersediaan informasi kinerja (Ramadhani, 2020). Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas Pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2016:17).

Teori lain menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam Pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nurhayati, 2017).

Dari beberapa argumentasi, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu hal yang penting dan perlu di laksanakan agar tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Transparansi merupakan keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi kepada masyarakat. Dan tujuannya transparansi adalah sebagai bukti kejujuran untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengelolanya.

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut buku saku Alokasi Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan Alokasi Dana Desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan referensi diatas Alokasi Dana Desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai metode dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menganalisis adanya dampak antara variabel X1 (Akuntabilitas), X2 (Transparansi) dan Y (Pengelolaan Alokasi Dana Desa).

Populasi di dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dikecamatan Togeon Kabupaten Tojo Una-Una yang berjumlah 16 Desa, masing-masing desa berjumlah 15 orang sehingga total populasi menjadi 240.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan beberapa kriteria tertentu, sehingga jumlah sampel menjadi 70. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan Observasi. Data hasil uji penelitian dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 23.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Adapun hasil pengujian dari masingmasing uji asumsi klasik sebagai berikut:

#### 1. Uji Normalitas

Model yang digunakan untuk mendeteksi uji normalitas dalam penelitian ini adalah uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. (Ghozali, 2011). Adapun hasil uji normalitas sebagai berikut :

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Predicted Value |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| N                                |                | 68                             |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | 24.3235294                     |
|                                  | Std. Deviation | .46590392                      |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .310                           |
|                                  | Positive       | .220                           |
|                                  | Negative       | -.310                          |
| Test Statistic                   |                | .310                           |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .302 <sup>c</sup>              |

a. Test distribution is Normal.

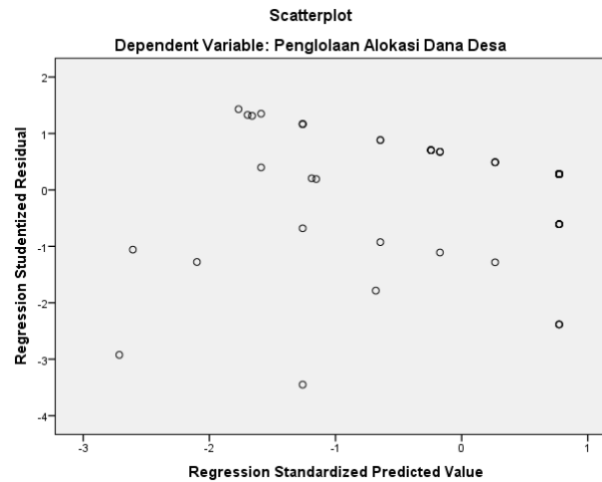
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan dihasilkan nilai nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0,302, dimana nilai ini adalah  $>0,05$ . Dengan demikian data penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

## 2. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedastisitas.



Berdasarkan hasil output scatterplot diatas diketahui bahwa :

1. Titik – titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya atas dan bawah saja
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola tertentu

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi

## 3. Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel bebas (independen) dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas.

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model         | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|               | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant)  | 13.257                      | 3.308      |                           | 4.007 | .000 |                         |       |
| Akuntabilitas | .220                        | .097       | .261                      | 2.276 | .026 | .999                    | 1.001 |
| Transparansi  | .237                        | .099       | .274                      | 2.387 | .020 | .999                    | 1.001 |

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil output data yang diolah, dimana dasar keputusan nilai tolerance > 0,10 dan jika nilai VIF < 10 maka dapat diartikan tidak terdapat multikolineritas. Didapatkan data Nilai tolerance = 0.999 > 0,10 dan nilai VIF 1.001 < 10. Sehingga dapat diartikan tidak terdapat multikolineritas.

## Pengujian Hipotesis

### Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda (MLR) adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel

dependen. MLR merupakan perluasan dari regresi kuadrat terkecil biasa (OLS) karena melibatkan lebih dari satu variabel penjelas. Dengan rumus persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 = e$$

**Keterangan :**

Y : Variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : koefisien regresi Akuntabilitas

$\beta_2$  : Koefisien regresi Transparansi

X1 : Variabel Akuntabilitas

X2 : Variabel Transparansi

E : Error/Sisa

Adapun variable dalam penelitian ini adalah :

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

| Model | Variables Entered                        | Variables Removed | Method |
|-------|------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1     | Transparansi, Akuntabilitas <sup>b</sup> | .                 | Enter  |

a. Dependent Variable: Penglolaan Alokasi Dana Desa

b. All requested variables entered.

**Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil uji F sebagai berikut :

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 14.543         | 2  | 7.272       | 5.604 | .006 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 84.339         | 65 | 1.298       |       |                   |
|       | Total      | 98.882         | 67 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: Penglolaan Alokasi Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji f diperoleh dari nilai signifikansi yaitu  $0,006 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) ada pengaruh secara simultan terhadap variabel Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Y).

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Hasil pengujian uji t berbantuan SPSS 23.0 adalah sebagai berikut :

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |               | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |               | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)    | 13.257                      | 3.308      |                           | 4.007 | .000 |
|       | Akuntabilitas | .220                        | .097       | .261                      | 2.276 | .026 |
|       | Transparansi  | .237                        | .099       | .274                      | 2.387 | .020 |

a. Dependent Variable: Penglolaan Alokasi Dana Desa



Hasil pengujian diatas dijabarkan sebagai berikut :

- a) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis uji parsial (Uji t) diperoleh bahwa nilai thitung  $2,276 > t_{tabel}$  1.997 dan nilai Sig  $0,026 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b) Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis uji parsial (Uji t) diperoleh bahwa nilai thitung  $2,387 > t_{tabel}$  1.997 dan nilai Sig  $0,020 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### Uji Koefisiensi Determinan R<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| 1     | .384 <sup>a</sup> | .147     | .121            | 1.139                      |

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan dari uji regresi linier berganda terhadap model penelitian, dari hasil uji diperoleh nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0.121 atau sebesar 12,1%. Sedangkan R<sup>2</sup> nya sebesar 0.147 atau 14.7%. Hal ini menunjukkan seberapa besar pengaruh Akuntabilitas (X<sub>1</sub>) dan Transparansi (X<sub>2</sub>) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 14.7%. Sedangkan sisanya 85,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Akuntabilitas (X<sub>1</sub>) Terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pada uji t bahwa Akuntabilitas (X<sub>1</sub>) menghasilkan bahwa Akuntabilitas (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Togean Kab, Tojo Una-Una. Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena berperan dalam menciptakan keterbukaan dan tanggungjawab, kepercayaan, dan efisiensi dalam penggunaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akuntabilitas mendorong aparatur desa untuk menggunakan dana secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan prioritas desa. Pengelolaan yang akuntabel juga memastikan bahwa tujuan penggunaan ADD tercapai, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana indikator akuntabilitas dikonstruksi pada indikator Keterbukaan Informasi Publik, Kemudahan Akses, Ketersediaan Data, Pelaksanaan Tugas dan Penyelesaian Tugas, Kemampuan Pelayanan. Sehingga penelitian dipandang mampu memberikan gambaran pelaksanaan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang berada di kecamatan togean.

Dipahami bahwa akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja agar pengendalian dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah, 2016).

Sudut pandang lain mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2016:18).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilaksanakan oleh Garung, Christa Yunnita dan Linda. (2020), penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

### **Pengaruh Transparansi (X2) Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)**

Transparansi (X2) dimana hasil pengujian bahwa Tranparansi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Transparansi memainkan peran penting dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena memastikan pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, dapat diakses oleh masyarakat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. engan transparansi, alokasi dana desa dapat diatur berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah disepakati bersama masyarakat. Transparansi adalah fondasi utama dalam pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Dengan transparansi, pemerintah desa dapat menciptakan pengelolaan dana yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya memperkuat tata kelola desa, tetapi juga mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kuisisioner yang digunakan, dimana indicator transparansi di kontruk pada 3 indicator utama yaitu *Informativeness* (informatif), meliputi : Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat, *Openness* (keterbukaan), Keterbukaan informasi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi sehingga dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat serta *Disclosure* (pengungkapan), Pengungkapan kepada masyarakat atau stakeholder atas aktivitas dan kinerja secara financial.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya transparansi akan menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Indikator transparansi adalah ketersediaan sistem informasi, aksesibilitas terhadap alokasi Alokasi Dana Desa, publikasi laporan keuangan dan ketersediaan informasi kinerja (Ramadhani, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ultafiah (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan

Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Baray Kabupaten Lahat. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa dalam mewujudkan Good Governance di Desa-desa di Kecamatan Papar.

### **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dihasilkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan diterima, dimana Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis uji simultan  $f$  dimana diperoleh dari nilai bahwa seluruh variabel independen Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) ada pengaruh secara simultan terhadap variabel Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Y).

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat Mencegah penyalahgunaan dana desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dapat mencegah penyalahgunaan dana desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Garung, Christa Yunnita dan Linda. (2020). Tentang Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti menarik kesimpulan pada penelitian pengaruh Akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas (X1) berpengaruh secara parsial signifikan terhadap Alokasi Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Togean Kab, Tojo Una-Una.
- b) Tranparansi (X2) berpengaruh secara parsial signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una.
- c) Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dikecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan demikian peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Bagi Pemerintah Desa hendaknya pemerintah desa untuk lebih dapat memaksimalkan kinerja pemerintahan terkhusus pada Akuntabilitas dan

Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Togean Kab. Tojo Una-Una.

- b) Bagi masyarakat kiranya dapat menjadikan penelitian sebagai informasi serta pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan bagaimana tingkat Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Togean Kab. Tojo Una-Una.
- c) Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam pelaksanakan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kepada peneliti selanjutnya kiranya dapat mengembangkan variable penelitian tentang pengelolaan dana desa guna pengembangan penelitian dimasa akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini. 2011. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dalam Annual Report (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Tercatat di BEI tahun 2008-2009). S1 FE Universitas Diponegoro (dipublikasikan).
- Asia, N., Betan, U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1).
- Asrini, A., Sudarmi, S., & Parawu, H. E. (2019). Pengaruh Dimensi Etika, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Sound Governance Di Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Kolaborasi : *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3). <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2942>
- FCGI. 2003. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jilid II. Jakarta: FCGI.
- Garung, Christa Yunnita dan Linda. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, Vol. 8, No.1, Maret
- Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta. Komite Nasional Kebijakan Governance
- Lengkong, V. P. K., & Tasik, H. H. D. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Dp2d2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i1.19144>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ed. 3, Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Buku Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press Yogyakarta
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi sektor publik, Andi: Yogyakarta
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Otoritas : *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>

- Nasirah. 2016. “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*”. Akuntansi. (Universitas Muhammadiyah Malang).
- Nurhayati. (2017). *Analisis teori transparansi dalam Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia*. Jakarta
- Rahmawati, 2015. *Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara)*. Skripsi. Lampung : Universitas Lampung, Jurusan Ilmu Pemerintah.
- Ramadhani. 2020. *Persepsi Stakeholder Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan layanan Umum*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Ras a, D., & Shaw, D. (2012). *When is Going Green Good for Company Image? Management Research View* , 35 (3), 326Y347.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ultafiah, 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Baray Kabupaten Lahat*.
- Umami, Nuruddin., (2017). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa* (Vol. 6 Ed. 11). ISSN 20886969.
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 323–340. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>